

**PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(STUDI DI KALURAHAN PUCUNG, KAPANEWON GIRISUBO,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

FAJRIN NUR HALIZAH

NIT. 22314508

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Strengthening social institutions and empowering women are important aspects in the development of a more inclusive village. This research aims to find out the role of the village government in strengthening and empowering women, identifying the obstacles faced, and finding out the solutions implemented. This research uses a social fact paradigm based on functional structural theory, empowerment theory, and role theory. This study uses a qualitative method with a descriptive approach through interviews, observations, and documentation of informants who were selected purposively. The results of the study show that the Pucung Village Government plays a role as a facilitator, mover, and opener of participation spaces through program support, mentoring and training for social institutions of PKK, KWT, Posyandu, Youth Organizations, MSME Groups, and Arts Groups. In addition, it involves women in development activities, including those related to land aspects. The obstacles faced include women's participation that is not optimal, domestic burdens, empowerment programs that are still in the development stage, and adjustments to programs to the needs of the community, especially women. Efforts to solve these obstacles are carried out through a persuasive approach, strengthening cooperation with various parties, continuous training and mentoring, and regeneration of women's institutions. Overall, strengthening social institutions supported by the active role of the village apparatus is able to increase women's participation and capacity, although it still requires continuous strengthening to achieve more optimal empowerment.

Keywords: Village government, social institutions, women's empowerment

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
1. Tujuan Penelitian.....	3
2. Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kajian Literatur	5
B. Kerangka Teoritis	9
1. <i>Social Fact Paradigm</i> (Paradigma Fakta Sosial)	9
2. <i>Structural Functional Theory</i> (Teori Struktural Fungsional)	10
3. <i>Empowerment Theory</i> (Teori Pemberdayaan)	11
4. <i>Role Theory</i> (Teori Peran)	11
5. Pemerintah Kalurahan	14
6. Kelembagaan Sosial	17
7. Pemberdayaan Perempuan	19
C. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Format Penelitian	25

B.	Lokasi Penelitian	25
C.	Operasionalisasi Penelitian	27
1.	Penetapan Informan.....	27
2.	Jumlah Informan	28
3.	Jenis Data	28
4.	Teknik Pengumpulan Data	30
5.	Alat Pengumpulan Data	30
6.	Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....		32
A.	Kondisi Geografis Kalurahan Pucung.....	32
B.	Kondisi Demografi Penduduk Kalurahan Pucung	34
1.	Kependudukan.....	34
2.	Mata Pencarian	35
3.	Sosial Budaya	39
C.	Struktur Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Pucung.....	42
D.	Kondisi Kelembagaan Sosial Kalurahan Pucung.....	44
BAB V DINAMIKA PEMERINTAH KALURAHAN		46
A.	Peran Pemerintah Kalurahan	46
1.	Peran Sebagai Fasilitator	46
2.	Peran Sebagai Penggerak	55
3.	Peran Sebagai Pembuka Ruang Partisipasi	65
B.	Kendala yang Dihadapi	73
C.	Solusi Penguatan dan Pemberdayaan	82
BAB VI PENUTUP		93
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....		96
LAMPIRAN.....		100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat kalurahan dipengaruhi oleh keberadaan kelembagaan sosial yang menjadi wadah partisipasi warga dalam berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki status hukum resmi, dengan batasan wilayah yang jelas, dan diberi kewenangan untuk mengelola serta menangani urusan pemerintahan, serta kepentingan warga setempat (UU No. 6 Tahun 2014:Pasal 1). Dalam konteks keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Gunungkidul, penyebutan desa menjadi kalurahan dan kecamatan menjadi kapanewon sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 merinci bentuk kelembagaan sosial di desa, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Posyandu, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan kemasyarakatan (Permendagri No 18 Tahun 2018:Pasal 6). Berjalannya kelembagaan sosial tersebut dipengaruhi oleh peran pemerintah kalurahan agar lembaga-lembaga sosial dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perempuan sering dipandang sebagai kelompok yang rendah posisinya dan masih mengalami ketidakadilan hak dengan laki-laki (Firdaus dkk., 2024:158). Ketidaksetaraan hak menjadi tantangan bagi perempuan untuk mengakses sumber daya produktif. Untuk mengatasi kondisi ini perlu adanya program pemberdayaan perempuan. Kalurahan Pucung memberdayakan perempuan melalui kelembagaan sosial masyarakat. PKK dan Karang Taruna menjadi penggerak sosial yang didukung oleh Pemerintah Kalurahan Pucung

secara langsung (Dinas Sosial Gunungkidul, 2025). Selain itu, terdapat kelembagaan sosial Kelompok Wanita Tani (KWT), Posyandu, Kelompok UMKM, serta Kelompok Seni dan Budaya.

Pemberdayaan perempuan di Kalurahan Pucung juga terlihat dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), di mana ibu-ibu mengolah singkong, sebagai potensi lokal, menjadi berbagai produk makanan ringan untuk menopang ekonomi keluarga dan masyarakat (Pemerintah Kalurahan Pucung, <https://desapucung.gunungkidulkab.go.id/>). Namun, berdasarkan literatur dari Firdaus dkk (2024:172), partisipasi perempuan di tingkat lokal sering menghadapi tantangan seperti akses terbatas terhadap sumber daya, sehingga kebutuhan untuk mengkaji peran pemerintah kalurahan dalam penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan menjadi penting.

Penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan berkaitan dengan bidang pertanahan karena penyelenggaraan pertanahan memerlukan partisipasi aktif masyarakat, termasuk perempuan, dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan, pemanfaatan, dan pengambilan keputusan mengenai sumber daya pertanahan di tingkat kalurahan. Kelembagaan sosial memberikan ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas, menyampaikan aspirasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan (Lutviantika & Prihatmoko, 2023:54). Penguatan kelembagaan sosial diharapkan mampu menciptakan ruang partisipasi yang inklusif sehingga perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pertanahan. Dengan demikian, peneliti tertarik melaksanakan penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Kelembagaan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan (Studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka didapatkan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Pucung dalam penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan?
3. Apa solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Pucung dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menetapkan beberapa tujuan sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kalurahan Pucung dalam penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan terkait aspek pertanahan di Kalurahan Pucung.
- c. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Pucung dalam mengatasi kendala yang ada.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait pengembangan peran pemerintah kalurahan dalam penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan.

- a. Bagi Kementerian ATR/BPN

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemberdayaan perempuan melalui kelembagaan sosial yang berkaitan dengan aspek pertanahan di tingkat kalurahan.

b. Bagi Pemerintah Kalurahan

Sebagai bahan evaluasi dalam merancang program pemberdayaan perempuan yang lebih terstruktur dan mengembangkan kelembagaan sosial yang lemah.

c. Bagi Politeknik Agraria STPN

Sebagai pengetahuan civitas akademika Politeknik Agraria STPN tentang peran pemerintah kalurahan dalam penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan.

d. Bagi Peneliti

Sebagai syarat kelulusan Program Studi Diploma IV Pertanian sekaligus sarana untuk menambah wawasan, pengalaman, dan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian Peran Pemerintah Kalurahan dalam Penguatan Kelembagaan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kalurahan Pucung memiliki tanggung jawab dalam memperkuat lembaga sosial dan memberdayakan perempuan melalui peran sebagai fasilitator, penggerak, dan pembuka ruang partisipasi. Peran sebagai fasilitator diwujudkan melalui pemberian dukungan kepada kelembagaan sosial, pelaksanaan program pertanahan seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan Politeknik Agraria STPN dalam kegiatan inventarisasi dan validasi data pertanahan, pengolahan data, serta pelaksanaan kegiatan lapangan. Peran sebagai penggerak diwujudkan melalui dorongan kepada masyarakat untuk aktif dalam kelembagaan sosial dan pemanfaatan sumber daya pertanahan secara produktif. Sementara itu, pembuka ruang partisipasi diwujudkan melalui musyawarah, forum pembangunan, serta pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan kalurahan.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Pucung dalam penguatan kelembagaan sosial dan pemberdayaan perempuan yaitu masih rendahnya partisipasi perempuan dalam menyampaikan usulan dan aspirasi pada forum formal, rendahnya rasa percaya diri perempuan untuk terlibat dalam kegiatan di tingkat kalurahan, beban domestik yang masih melekat pada perempuan sehingga memengaruhi keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, adanya perbedaan pandangan dan kepentingan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, serta kendala administrasi pertanahan yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah melalui pewarisan, khususnya ketika ahli waris berdomisili di luar daerah sehingga memperlambat proses administrasi pertanahan. Selain itu,

keberlanjutan beberapa kegiatan kelembagaan sosial juga masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, dukungan program, dan tingkat kemandirian kelompok masyarakat.

3. Solusi yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Pucung dalam mengatasi kendala tersebut dilakukan melalui peningkatan pendekatan persuasif kepada perempuan, optimalisasi kerja sama dengan berbagai stakeholder, pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan dukungan program, pembangunan komitmen dan regenerasi kelembagaan perempuan, serta penguatan pemahaman masyarakat mengenai administrasi dan kepemilikan hak atas tanah melalui sosialisasi. Upaya tersebut dilakukan agar meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan, serta mendukung pemanfaatan sumber daya pertanahan secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kalurahan Pucung masih perlu meningkatkan pendampingan terhadap kelembagaan sosial perempuan secara berkelanjutan. Perangkat Kalurahan Pucung bisa membentuk keberanian masyarakat perempuan dalam berpendapat. Hal itu bisa dilakukan dengan cara aktif mengikutsertakan para perempuan secara bergantian dalam pengambilan keputusan di tingkat kalurahan maupun padukuhan. Pemerintah kalurahan juga harus melakukan perluasan pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pertanahan, serta memperkuat kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, Politeknik Agraria STPN, dan instansi terkait dalam mendukung kegiatan pertanahan dan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan.

Perempuan di Kalurahan Pucung diharapkan lebih aktif memanfaatkan ruang partisipasi yang telah disediakan oleh pemerintah kalurahan melalui musyawarah, kegiatan kelembagaan sosial, maupun berbagai program pemberdayaan. Partisipasi aktif tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perempuan dalam menyampaikan aspirasi, berkontribusi dalam

pembangunan, serta memperkuat peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, perempuan juga diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai administrasi pertanahan, kepemilikan hak atas tanah, serta pemanfaatan sumber daya pertanahan agar mampu mengelola dan memanfaatkan tanah secara optimal, produktif, dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dampak program pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan kapasitas, kemandirian, partisipasi perempuan, serta kepastian hak atas tanah perempuan. Penelitian tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi perempuan sebelum dan sesudah mengikuti program pemberdayaan sehingga perubahan yang terjadi dapat dianalisis secara lebih komprehensif. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemberdayaan perempuan dalam perspektif pertanahan sekaligus menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah kalurahan, Kantor Pertanahan, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A., & Muhammad, A. S. (2024). Upaya Penguatan Kapasitas Pamong di Kalurahan Condongcatur. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 18(01), 26–36. <https://doi.org/10.52434/jp.v18i01.342>
- Astuty. (2021). *Dialog sebagai Penguatan Kelembagaan (Studi pada Lembaga Adat Ngata Toro)*. 8, 100–109.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (2025). Kecamatan Girisubo Dalam Angka 2025. Dalam *GIRISUBO DISTRICT IN FIGURES* (Vol. 20).
- Dinas Sosial Gunungkidul. (2025). *Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul*. Diakses 25 November 2025, dari <https://sosial.gunungkidulkab.go.id/>
- Durkheim, E. (1982). *The rules of sociological method* (S. Lukes, Ed.; W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Original work published 1895).
- Erianto, F., Jumadi, M., & Suryaningsi. (2025). *Ketidaksetaraan Gender dalam Partisipasi Pengambilan Keputusan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Volume 2 Nomor 2*, 65–74.
- Firdaus, E., Artina, D., Rauf, M. A., Separen, & Wijaya, T. T. (2024). *Has Women's Participation in Local Government Been Strengthened? A Legal and Political Analysis in Riau Province?* 9(1). <https://doi.org/10.15294/jils.v9i1.45440>
- Harianti, I., & Choiriyah, I. U. (2025). *Village Government Roles in Strengthening Women's Empowerment Programs: Peran Pemerintah Desa dalam Memperkuat Program Pemberdayaan Perempuan*. 26. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v26i4.1462>
- Harnisch, S., Frank, C., & Maull, H. W. (Eds.). (2011). *Role theory in international relations: Approaches and analyses*. Routledge.
- Leach, M., Mehta, L., & Prabhakaran, P. (2016). *Gender Equality and Sustainable Development: A Pathways Approach*.
- Linton, R. (1936). *The study of man: An introduction*. D. Appleton-Century Company.

- Lutviantika, E., & Prihatmoko, J. J. (2023). *Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Dukuh Seti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati* (Vol. 20, Nomor 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31942/spektrum.v20i2.9157>
- Mardhiah, A., & Safrida. (2022). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Pulau Kayu* (Vol. 12, Nomor 03). <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2484>
- Meiliawati, I., Windani, S., & Ayu, R. (2023). Pengaruh Ketimpangan Gender Dalam Kepemilikan Tanah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Tinjauan Terhadap Perspektif Hukum Pertanahan. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* (Vol. 4, Nomor 2).
- Miftahuljannah, Isabella, & Amaliatulwalidain. (2022). *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK): VIII*.
- Muhamad, H. (2025). *Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Desa di Blok Bahodopi)* (Vol. 1, Nomor 1). JUNI-2025. <https://orcid.org/0000-0003-1464-2269>
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria*.
- Nugroho, A. (2025). *Interdisciplinary Social Studies Gender awareness in Wotawati in the 15 th century*. 4, 110–121. <https://iss.internationaljournallabs.com/index.php/iss>
- Nugroho, A. (2025b). Riset Agraria dengan Metode Penelitian Kualitatif. *Tangguh Denara Jaya Publisher*.
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Free Press.
- Pemerintah Kalurahan Pucung. (2022). *Masterplan Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta Tahun 2022-2042*.
- Pemerintah Kalurahan Pucung. (2024). *Kalurahan Pucung*. Diakses 23 November 2025, dari <https://desapucung.gunungkidulkab.go.id/>
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2019). *Teori sosiologi* (Ed. ke-10). Pustaka Pelajar.
- Salmiah, N., & Halikin. (2023). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan

- Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan* (Vol. 01 No. 01).
- Sudirman, Senthot. et al. (2018). "Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional." Yogyakarta, STPN Press.
- Syahputra, M. R. H., Syamsir, Zidane, G. M., Morandez, M. Z., Oktariandani, N. R., Candra, I. F., & Yunico, D. (2025). Peran Kelembagaan Sosial dalam Penguatan Identitas Budaya di Kota Padang. *JMA*, 3(4), 1–11. <https://doi.org/10.62281>
- Tindangen, M., Engka, D. S., & Wauran, P. C. (2020). *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*.
- Wallerstein, N. (1993). Empowerment and health: The theory and practice of community change. *Community Development Journal*, 28(3), 218–227.
- Widyastuti, N., & Kusumawati, D. A. (2024). Strengthening Institutional Social-Economic Institutions Through Village-Owned Enterprises (BUMDes). *International Journal of Applied Business & International Management (IJABIM)*, 9(1), 88–101. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v9i1.2961>
- Wogo, C. V., Nursalam, & Andayana, M. N. D. (2025). *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang*. 9, 1–8.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.
- Peraturan Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria